



## KEBIJAKAN IMIGRASI PEMERINTAHAN PRESIDEN DONALD TRUMP

Adirini Pujayanti\*)

### Abstrak

*Pada awal masa pemerintahannya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat kebijakan keimigrasian baru untuk melindungi keamanan nasional AS dari serangan teroris. Kebijakan ini dinilai diskriminatif karena hanya melarang warga negara dari tujuh negara mayoritas muslim, yakni Suriah, Iran, Irak, Yaman, Sudan, Somalia, dan Libya untuk masuk ke AS. Kebijakan Trump ini dianggap memberikan stigma bahwa seluruh warga negara ke tujuh negara tersebut adalah teroris. Dalam kebijakan imigrasi baru tersebut Trump juga menunda penerimaan pengungsi selama 120 hari. Kebijakan Trump tersebut menimbulkan reaksi penolakan, baik di dalam negeri maupun luar negeri AS. Selain dianggap bertentangan dengan konstitusi AS dan HAM, kebijakan tersebut juga merugikan kerja sama internasional melawan terorisme. Meskipun Indonesia tidak terdampak langsung oleh kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia tetap perlu melakukan langkah antisipasi.*

### Pendahuluan

Pada tanggal 29 Januari 2017 Presiden AS Donald Trump menerbitkan perintah eksekutif bertajuk “Perlindungan Bangsa dari Teroris Asing Masuk ke Amerika Serikat” yang berisi kebijakan keimigrasian AS yang baru di bawah pemerintahannya. Kebijakan tersebut berisi larangan masuk bagi warga negara dari tujuh negara mayoritas muslim, yakni Suriah, Iran, Irak, Yaman, Sudan, Somalia, dan Libya selama 90 hari ke depan serta penundaan penerimaan pengungsi selama 120 hari. Kebijakan tersebut ditujukan kepada pengungsi, penduduk sah, serta

pemilik kewarganegaraan ganda selain AS dan Kanada, termasuk pemegang *green card* dari tujuh negara tersebut. Para pendatang yang sesuai dengan kriteria tersebut ditahan setibanya mereka di bandara AS. Wisatawan yang telah memiliki visa resmi dan tiket menuju AS dicegah untuk terbang, termasuk yang telah berada di negara transit menuju AS.

Presiden Trump berdalih kebijakan tersebut ditempuh demi keamanan nasional AS untuk mencegah aksi terorisme di AS. Pemerintahan Trump menegaskan kebijakan itu bukan diskriminasi terhadap muslim.

\*) Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: adirini.pujayanti@dpr.go.id



Fokus kebijakan tersebut adalah negara-negara yang menjadi tempat berkembangnya terorisme, yang kebetulan mayoritas warga negaranya muslim. Presiden Trump memastikan pemerintahannya akan kembali mengeluarkan visa untuk semua negara setelah dilakukan evaluasi. Tulisan ini bertujuan memaparkan kebijakan imigrasi Pemerintahan Presiden Donald Trump dan dampaknya terhadap kerja sama internasional dan Indonesia.

## Kebijakan Imigrasi Pemerintahan Trump

Kebijakan imigrasi Pemerintahan Trump merupakan bagian dari janji politik masa kampanye Presiden Trump "*American First*". Ini merupakan kebijakan populis nasionalistik untuk memproteksi kepentingan AS dari segala bentuk ancaman. Dalam hal ini AS di bawah Presiden Trump akan menempuh cara unilateralisme, yaitu bertindak secara sepihak demi kepentingannya. Kebijakan ini merupakan perlawanan terhadap kemapanan pada isu-isu globalisasi, perdagangan bebas, dan imigrasi yang merupakan konsensus elite politik sebelumnya namun tidak memuaskan publik AS. Menurut Trump, secara ekonomi kesempatan kerja warga AS telah diserobot oleh imigran dan warga negara AS telah menjadi target aksi terorisme.

Kebijakan imigrasi Presiden Trump menimbulkan reaksi penolakan dari dalam negeri AS. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Amerika yang meyakini negaranya sebagai tanah kebebasan dan harapan. Hal ini juga dianggap sebagai pengingkaran sejarah AS yang dibangun oleh kaum migran dan menempatkan AS sebagai negara yang tidak lagi mendukung demokrasi dan HAM. Pemilihan ketujuh negara tersebut dipertanyakan karena sumber terorisme tidak hanya di tujuh negara tersebut. Dalam berbagai serangan teroris yang terjadi di AS, baik pada 11 September 2001 maupun sesudahnya, tak seorang pun dilakukan oleh imigran atau warga negara AS yang lahir dari keluarga yang berasal dari ketujuh negara tersebut. Muncul kecurigaan bahwa pemilihan tujuh negara itu karena Donald Trump tidak memiliki hubungan bisnis di negara-negara tersebut. Presiden Trump berdalih penentuan tujuh negara tersebut merupakan lanjutan dari kebijakan Presiden Obama.

Kebijakan Trump dinilai diskriminatif, bahkan rasialis dan membahayakan keutuhan AS. Jaksa Agung dari 16 negara bagian menilai putusan tersebut inkonstitusional dan bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan AS. Implementasi kebijakan ini akan menimbulkan deportasi besar terhadap warga yang sesuai kriteria aturan tersebut. Banyak keluarga akan terpecah. Pariwisata AS akan menurun dan penerimaan dari sektor pendidikan berkurang dengan berkurangnya mahasiswa asing. Beberapa universitas menolak untuk mengungkapkan status keimigrasian para mahasiswanya untuk mencegah mereka dideportasi. Ratusan diplomat menyebarkan memo mengkritisi kebijakan Presiden Trump kepada pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS. Mereka menganggap kebijakan tersebut tidak efektif untuk melawan terorisme, merusak citra AS, dan pada akhirnya mengancam perekonomian AS. Dewan Relasi Islam Amerika secara resmi menuntut Trump ke pengadilan federal distrik Virginia sebagai kebijakan yang mendiskriminasi muslim dan melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS. Para pemimpin perusahaan industri teknologi AS menentang keras karena selama ini industri teknologi AS mengandalkan para insinyur perangkat lunak asing untuk memenuhi kebutuhan pekerjaannya.

Mahkamah Banding Federal AS menolak banding Departemen Kehakiman untuk memberlakukan keputusan kebijakan imigrasi Presiden Trump. Pemerintahan Trump tetap bersikukuh mempertahankan kebijakan imigrasi yang baru tersebut. Keputusan Mahkamah Federal dinilai membahayakan Pemerintah Federal dan bangsa AS karena meragukan keputusan presiden. Untuk sementara, warga negara pemilik visa dari tujuh negara tersebut masih boleh masuk ke AS. Para pengungsi yang diijinkan masuk ke AS hanya mereka yang sudah dijadwalkan masuk ke AS sebelum larangan ditandatangani. Pemerintah Trump hingga 17 Februari 2017 akan fokus pada penentuan jadwal perjalanan para pengungsi. Para diplomat dan birokrat yang tidak setuju terhadap kebijakannya diminta untuk mengundurkan diri, dan pelaksana tugas Departemen Kehakiman Jaksa Agung Federal Sally Yates yang menolak untuk membela kebijakan imigrasi tersebut dipecat. Universitas yang menolak melaksanakan kebijakan imigrasi tidak akan mendapat bantuan dana federal.

## Respons Internasional

Di luar negeri, kebijakan Presiden Trump telah memicu reaksi keras dunia. Konsekuensi dari proteksionisme dan pelanggaran nilai-nilai demokrasi termasuk dalam penerimaan pengungsi mendapat kecaman dari dunia internasional. Kebijakan imigrasi AS tersebut melemahkan aliansi lama AS dengan negara-negara sekutunya di Eropa. Moto “*American First*” yang ia canangkan mengesankan aliansi global menjadi nomor dua dan tidak adanya keinginan untuk maju bersama. Kebijakan populis Trump mengancam stabilitas dan keamanan karena AS bertindak secara unilateral dan mengancam kerja sama komprehensif dengan Eropa. Pemerintah Perancis menyerukan persatuan Eropa menghadapi Trump dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi. Negara-negara sekutu AS di Eropa mengkhawatirkan dengan menutup AS maka para pengungsi dan imigran akan kembali menargetkan Eropa dan membebani perekonomian benua tersebut. Sejumlah tokoh sayap kanan di Eropa, di antaranya Nigel Farage dari Inggris dan Geert Wilders dari Belanda sangat mendukung kebijakan imigrasi Trump tersebut. Kebijakan populis nasionalistik Trump dinilai memperkuat posisi kaum ultra kanan Eropa.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) secara resmi mengecam kebijakan Trump. OKI menilai kebijakan ini makin memperkuat anarkisme dan terorisme di tengah upaya internasional melawan terorisme dan seluruh manifestasinya. Sementara itu, Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) dan organisasi yang terkait PBB di bidang migrasi, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mendesak Pemerintah AS untuk tetap terbuka kepada pengungsi perang dan korban penganiayaan secara politik dan sosial. PBB menyatakan pemberian suaka bagi pengungsi dan penempatan mereka di AS adalah salah satu yang paling penting di dunia. Sementara Iran mengeluarkan kebijakan balasan dengan menghentikan visa kunjungan penduduk AS. Pasukan Garda Revolusi Iran juga telah menggelar uji coba nuklir dan sistem radar untuk menunjukkan kekuatan militer Iran.

Kanada, negara tetangga AS, mengeluarkan kebijakan terbuka untuk menerima imigran dan pengungsi yang ditolak AS di negaranya. Pemerintah Kanada

menempuh kebijakan ini untuk mengamankan kepentingan ekonominya karena AS adalah negara tujuan ekspor utama Kanada. Kebijakan ini ditentang pihak nasionalis kanan Kanada dan diduga menjadi alasan insiden penembakan kaum muslim di masjid pusat kebudayaan Islam di kota Quebec pada minggu (29/1) lalu. Australia merupakan satu-satunya negara yang mendukung kebijakan imigrasi Presiden Trump. Menurut PM Australia Malcolm Turnbull, sangat penting bagi setiap negara mengendalikan perbatasannya dengan “Kebijakan Pintu Tertutup”, walaupun harus menghadapi kritik publik. AS mempunyai perjanjian untuk menerima 1.200 orang pengungsi dari Australia.

## Respons Indonesia

Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan di Jakarta meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa kebijakan tersebut bukan ditujukan kepada umat Islam tetapi demi keamanan AS dari terorisme. Presiden Indonesia Joko Widodo meyakini kebijakan imigrasi yang diambil Presiden Trump tidak berdampak langsung pada warga negara Indonesia. Namun demikian Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan penyesalan mendalam terhadap kebijakan yang ditempuh AS. Ia menegaskan, satu-satunya cara meraih kemenangan terhadap terorisme adalah melalui kerja sama internasional. Menghubungkan radikalisme dan terorisme dengan agama tertentu merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hubungan internasional yang beradab dan saling menghormati. Langkah Trump dapat merusak kerja sama global dalam memerangi terorisme karena AS dapat dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara Islam moderat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kebijakan Trump akan menambah kecurigaan terhadap dunia Islam. Hal ini menimbulkan efek tidak langsung, termasuk ke Indonesia karena berpotensi membuat berputarnya haluan para imigran ke Asia. Indonesia adalah negara transit imigran ke Australia. Meskipun tidak termasuk dalam negara peratifikasi Konvensi 1951 yang mengatur regulasi internasional terkait pengungsi, Indonesia bersikap terbuka bagi para pengungsi. Saat ini jumlah pengungsi dan pencari suaka yang ada di Indonesia diperkirakan mencapai 14.000 orang.

Indonesia tidak mempunyai rencana untuk mengeluarkan imbauan perjalanan atau *travel advisory* ke AS. Kemenlu mengeluarkan himbauan agar WNI di AS tetap menghormati hukum dan ikut menjaga ketertiban. Kemenlu terus memantau perkembangan dan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul bagi WNI, dan menginstruksikan seluruh perwakilan RI di AS mengaktifkan layanan *hotline* 24 jam. Perlindungan WNI menjadi prioritas KBRI di AS. Jumlah WNI di AS saat ini berkisar 120.000–400.000 orang, diperkirakan sekitar 40.000 orang berstatus migran ilegal.

Dari sudut ekonomi, bagi negara berkembang seperti Indonesia, perkembangan yang terjadi di AS tidak boleh diabaikan. Menurut data BPS, AS merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia pada tahun 2016, dengan nilai 15,098 miliar dolar AS. Impor Indonesia dari AS pada tahun 2016 sebesar 7,202 miliar dolar AS. Kalangan investor pasar keuangan terlihat khawatir dengan kebijakan kontroversial tersebut. Kebijakan Presiden Trump menyebabkan dolar AS melemah terhadap mata uang utama lainnya dengan adanya rasa kekhawatiran pasar terhadap kebijakan imigrasi Trump. Hal ini sedikit banyak dapat berpengaruh terhadap perekonomian RI.

## Penutup

Kebijakan keimigrasian Trump mengingatkan Indonesia untuk semakin memperkuat keamanan nasional dalam perang melawan terorisme dan membangun Indonesia yang plural. DPR perlu meminta kepada Pemerintah untuk melakukan langkah antisipasi dalam upaya melawan terorisme dengan membangun kerja sama kemitraan dengan lebih banyak negara. Pendekatan unilateral model Trump akan menjadi bumerang bagi AS. Kebijakan ini tidak menjamin kelompok radikal dan teroris akan mengendurkan aksinya di AS ataupun menargetkan warga negara AS di seluruh dunia. Kebijakan Presiden Trump ini juga menjadi hambatan dalam kerja sama global regulasi pengungsi internasional. Sebagai negara yang menjalankan politik bebas aktif, Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai kebijakan imigrasi Trump. Bukan tidak mungkin, kelak Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia akan mendapat perlakuan diskriminatif serupa.

Kebijakan imigrasi AS mendapat reaksi penolakan baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perekonomian AS dan penurunan peminat wisata ke negara tersebut. Pemerintah Indonesia perlu mencermati arah kebijakan AS, termasuk di bidang keimigrasian, sebab kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari konstelasi politik dan kebijakan suatu negara. Arah kebijakan proteksionisme AS akan mempengaruhi kinerja ekspor beberapa komoditas dari Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi hal ini dengan sebanyak mungkin membangun mitra bisnis baru. Meskipun demikian, kebijakan keimigrasian AS dapat bermanfaat positif bagi industri pariwisata Indonesia. Indonesia dapat memanfaatkan peluang menurunnya minat wisatawan, khususnya dari negara muslim dan Timur Tengah dengan memperkuat program pariwisata untuk mengalihkan wisatawan internasional dari AS ke Indonesia.

## Referensi

- “AS Pengaruhi Tatanan Wisata”, *Kompas*, 1 Februari 2017, h. 17.
- “Australian Leader Offers Tips on Trump”, *The Wall Street Journal*, 1 Februari 2017, h. A4.
- “For U.S Allies, getting Close to Trump Can Sting”, *The NY Times*, 1 Februari 2017, h. 4.
- “JK Soal Kebijakan Imigrasi Trump: Ini Menambah Kecurigaan ke Islam”, 31 Jan 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3409882/jk-soal-kebijakan-imigrasi-trump-ini-menambah-kecurigaan-ke-islam>, diakses 31 Januari 2017.
- “Jokowi: Jangan Resah”, *Republika*, 31 Januari 2017, h. 1.
- “Kebijakan Trump Ganggu Perang Lawan terorisme”, *Media Indonesia*, 30 Januari 2017, h. 1.
- “Keputusan Trump Dilawan”, *Kompas*, 31 Januari 2017, h. 1.
- “Pukulan Telak Bagi Trump”, *Kompas*, 6 Februari 2017, h. 8.
- Simon Saragih, “Trump Melemahkan Aliasi Lama”, *Kompas*, 29 Januari 2017, h. 4.
- “Trump Pecat Plt Jaksa Agung yang Menolak Bela Kebijakan Imigrasi”, 31 Jan 2017, <https://news.detik.com/internasional/3409750/trump-pecat-plt-jaksa-agung-yang-menolak-bela-kebijakan-imigrasi>, diakses 31 Januari 2017.